

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN PASIEN TERHADAP TINDAKAN MEDIS YANG DIDASARKAN PADA PERSETUJUAN

Deni Haryanto

Abstrak

Persetujuan tindakan medis yang dilakukan oleh pasien atau keluarga terdekat pasien dengan Dokter dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana. Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai pertanggungjawaban perdata tenaga medis atas tindakan medis berdasarkan persetujuan tindakan medis. Pertanggungjawaban pidana tenaga medis atas tindakan medis berdasarkan persetujuan tindakan medis dan upaya hukum pasien terhadap kerugian yang ditimbulkan dari tindakan medis yang didasarkan pada persetujuan tindakan medis.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dan bersifat deskriptif analitis yang memaparkan sekaligus menganalisis suatu fenomena yang berhubungan dengan Upaya Hukum Pasien Terhadap Tindakan Medis Yang didasarkan Pada Persetujuan Medis.

Hasil penelitian, Pertanggungjawaban perdata tenaga medis atas tindakan medis berdasarkan persetujuan tindakan medis dimana persetujuan tindakan medis yang telah dilakukan atau disepakati antara dokter dan pasien bukan tidak menutup kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban secara keperdataan dengan syarat terdapat kerugian akan pelanggaran yang dilakukan oleh dokter sehingga dokter dapat dimintai ganti rugi yang dialami pasien dalam bentuk wanprestasi terkait terlanggarnya prestasi atau perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHP perdata. Pertanggungjawaban pidana tenaga medis atas tindakan medis berdasarkan persetujuan tindakan medis ialah melekat pada Pasal 359 KUHP, yakni lalai yang menyebabkan orang lain meninggal, Pasal 360 ayat (1) KUHP, yakni lalai yang menyebabkan seseorang sakit sementara dimana terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dari pasal-pasal tersebut, yakni adanya kemampuan bertanggungjawab dokter, Adanya kelalaian dari dokter dan alasan penghapusan pidana berupa tidak adanya alasan pemaaf sehingga dokter dapat dipidana yang mana juga harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu Duty (kewajiban), Derelictions of That Duty (Penyimpangan Kewajiban), Damage (Kerugian), Direct Causal Relationship (Berkaitan langsung). Dimana penerapan Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP di जो कन Pasal 361 KUHP. Upaya hukum pasien terhadap kerugian yang ditimbulkan dari tindakan medis yang didasarkan pada

persetujuan tindakan medis ialah tentunya jika yang terjadi ialah perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi sedangkan untuk pidana harus dilakukan pelaporan kepihak kepolisian untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Namun, merujuk pada Pasal 29 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maka kecenderungan hubungan hukum anatar pasien dan dokter termasuk persetujuan medis jika terjadi peristiwa pidana maupun perdata harus diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi.

Hendaknya Pemerintah melakukan perevisian terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No.290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Dimana disana harus juga memuat persoalan terkait dokter yang melakukan pelanggaran keperdataan sehingga dapat lebih memberikan penjaminan hukum kepada pasien atau masyarakat. Hendaknya Pemerintah melakukan perevisian terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No.290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dimana disana harus juga memuat persoalan terkait dokter yang melakukan pelanggaran pidana sehingga dapat lebih memberikan penjaminan hukum kepada pasien atau masyarakat. Hendaknya pengaturan Pasal 29 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang cenderung memberikan pengaturan terkait hubungan hukum antara pasien dan dokter termasuk persetujuan medis jika terjadi peristiwa pidana maupun perdata harus diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi dilakukan perubahan oleh pemerintah atau lembaga legislative karena tidak mencerminkan asas keadilan.

Kata kunci: Dokter, Pasien dan Persetujuan Tindakan Medis

**LEGAL PROTECTION OF PATIENT LOSSES
AGAINST BASED MEDICAL ACTIONS
ON CONSENT**

Deni Haryanto

Abstract

Agreement for medical action carried out by the patient or the patient's closest family with the Doctor can be held liable in civil or criminal terms. Therefore, it is necessary to study the civil liability of medical personnel for medical actions based on approval of medical actions. Criminal liability of medical personnel for medical actions based on approval of actions medical action and the patient's legal remedies against losses arising from medical action based on the approval of medical action.

This research is a normative research, and is descriptive-analytical in nature which describes and analyzes a phenomenon related to patient legal efforts for medical action based on medical consent.

The results of the study, civil liability of medical personnel for medical actions based on medical action agreements where medical action agreements have been carried out or agreed between doctors and patients does not rule out being held civilly responsible on condition that there is a loss for violations committed by doctors so that doctors can be held liable Compensation suffered by patients in the form of default related to violation of performance or unlawful acts as stated in Article 1365, Article 1366 and Article 1367 of the Civil Code. The criminal liability of medical personnel for medical actions based on the approval of medical actions is attached to Article 359 of the Criminal Code, namely negligence by causing another person to die, Article 360 paragraph (1) of the Criminal Code, namely negligence which causes a person to become temporarily ill where the elements of criminal responsibility from these articles are fulfilled, namely the ability to be responsible for a doctor, There is negligence on the part of the doctor and the reason for the abolition of the crime in the form of the absence of a forgiving excuse so that the doctor can be punished which must also meet several criteria, namely Duty (obligation), Derelictions of That Duty (Deviation of Obligations), Damage (Losses), Direct Causal Relationship (Related directly). Where the application of Article 359 of the Criminal Code and

Article 360 of the Criminal Code is in place of Article 361 of the Criminal Code. The patient's legal efforts against losses arising from medical action are based on the approval of medical action, of course if what happens is an unlawful act or default can be resolved through the non-litigation, while criminal cases must be reported to the police for follow-up in accordance with the applicable criminal procedure law. However, referring to Article 29 of Law No. 36 of 2009 concerning Health, the tendency for legal relations between patients and doctors including medical approval if a criminal or civil event occurs must be resolved first through a mediation process.

The Government should revise the Regulation of the Minister of Health No.290/MENKES/PER/III/2008 Concerning Approval of Medical Actions where it must also include issues related to doctors who commit civil violations so that they can provide more legal guarantees to patients or the public. against Regulation of the Minister of Health No.290/MENKES/PER/III/2008 Concerning Approval of Medical Actions where it must also contain issues related to doctors who commit criminal offenses so that they can provide more legal guarantees to patients or the public. Article 29 of Law No.36 of 2009 concerning Health, which tends to provide arrangements regarding the legal relationship between patients and doctors, including medical approval in the event of a criminal or civil incident, must first be resolved through a mediation process, changes must be made by the government or legislative institutions because it does not reflect the principle of justice.

Keywords: Doctors, Patients and Consent to Medical Actions